



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
Website: bkd.jatimprov.go.id Email: bkdjatim@gmail.com
SURABAYA 60236

Surabaya, 4 April 2019

Nomor : 800/ ~~4325~~ /204.2/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 2 halaman
Perihal : **Entry alamat e-mail pada
Aplikasi e-MASTER**

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
di-
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyampaian Laporan Teknis Instansi Pemerintah dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Sehubungan dengan hal tersebut maka kami mohon dengan hormat kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk **mengentry / mengisi alamat e-mail** pada menu Biodata (*aplikasi e-MASTER*) paling lambat tanggal **15 April 2019** dan selanjutnya data e-mail tersebut akan dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**



ANOM SURAHNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19630524 199803 1 001

Tembusan:

Yth. Bpk Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur (sebagai laporan)



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

22 Februari 2019

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural
10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Para Gubernur; dan
12. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Menindaklanjuti perintah Presiden untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah, menyederhanakan penyampaian laporan kinerja pada instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membangun "sistem aplikasi Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyampaian Laporan Kinerja secara *online* dalam bentuk *paperless* (e-SAKIP Reviu)". Melalui aplikasi ini, penyampaian dokumen serta pembinaan/pendampingan percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilakukan dari jarak jauh melalui situs esr.menpan.go.id.

Kemudian dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membangun sistem penyampaian LHKASN tersebut secara *online* melalui siharka.menpan.go.id.

Berdasarkan hal di atas, kami menyampaikan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Mengunggah dokumen akuntabilitas kinerja antara lain dokumen perencanaan kinerja lima tahunan (RPJMD/Renstra), dokumen perencanaan kinerja tahunan (RKPD/Renja), dokumen Indikator kinerja utama, dokumen perjanjian kinerja, dokumen rencana aksi kinerja, dan dokumen laporan kinerja Instansi Pemerintah sampai ke unit organisasi terkecil pada Instansi Pemerintah tersebut melalui aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id). Khusus untuk dokumen laporan kinerja tahun 2018 agar dapat disampaikan melalui aplikasi e-SAKIP Reviu paling lambat tanggal 28 Februari 2019 untuk kementerian/ lembaga dan tanggal 31 Maret 2019 untuk Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.
2. Menyampaikan LHKASN secara online melalui siharka.menpan.go.id bagi pegawai wajib LHKASN yang belum menyampaikan LHKASN.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, Kami sampaikan terima kasih

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Syafruddin
Syafruddin

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.